

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Fatululi masih bersifat terbatas dan belum merata, karena tidak semua masyarakat diundang atau mengetahui pelaksanaan Musrenbang secara langsung. Yang menghadiri kegiatan hanya diwakilkan oleh orang-orang tertentu, seperti RT, RW dan Tokoh Masyarakat.
2. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di kelurahan Fatululi saling melengkapi dan menciptakan kolaborasi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan. Faktor pendukungnya mencakup motivasi warga, peran tokoh masyarakat, dan dukungan dari pemerintah kecamatan.
3. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Fatululi mencakup keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, kurangnya penyebaran informasi, serta minimnya tindak lanjut yang transparan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan simbolik, serta menimbulkan kesan bahwa Musrenbang hanya forum formalitas tanpa hasil yang nyata.

4. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Fatululi dilakukan melalui peningkatan komunikasi, transparansi, dan keterlibatan langsung pemerintah di lapangan. Peran aktif RT/RW serta perhatian terhadap kelompok ekonomi menengah ke bawah juga menjadi kunci untuk mendorong partisipasi yang lebih merata dan bermakna dalam proses perencanaan pembangunan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan pendapat sebagai masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Fatululi. Adapun saran-sarannya diantaranya:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Informasi kepada Warga

Pemerintah Kelurahan Fatululi perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai Musrenbang, baik terkait tujuan, mekanisme, maupun manfaatnya. Informasi harus disampaikan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, seperti pengumuman langsung, pamflet, pengeras suara di lingkungan, dan media sosial, agar tidak hanya diketahui oleh perwakilan RT/RW saja.

2. Mendorong Keterlibatan Langsung Warga

Perlu ada kebijakan yang mendorong pelibatan warga secara langsung dalam tahap-tahap Musrenbang, bukan hanya melalui perwakilan. Dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, aspirasi yang dihimpun akan lebih mencerminkan kebutuhan riil di lingkungan masing-masing.

3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Diperlukan pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perencanaan pembangunan, termasuk bagaimana cara menyusun usulan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas usulan dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dan konstruktif.

4. Optimalisasi Peran RT/RW dan Tokoh Masyarakat

RT, RW, dan tokoh masyarakat sebaiknya lebih aktif dalam menjaring aspirasi warganya dan menyampaikannya dalam forum Musrenbang. Mereka juga perlu melaporkan kembali hasil Musrenbang kepada warganya agar terjadi komunikasi dua arah yang transparan dan akuntabel.

5. Perluasan Alokasi Anggaran

Pemerintah daerah dan kelurahan disarankan untuk mempertimbangkan penambahan anggaran kegiatan Musrenbang, termasuk dalam hal konsumsi dan fasilitas, agar memungkinkan pelibatan peserta yang lebih luas. Hal ini penting untuk menghindari pembatasan partisipasi hanya karena alasan teknis atau biaya.